KR-Antara/Didik Suhartono

GAMPLONG JEEP ADVENTURE: Wisatawan 'offroad' menyusuri Kali Progo di Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman, Rabu (15/11/2023). Wisata keindahan alam menyusuri Kali Progo dengan mengendarai kendaraan 'offroad' itu dipatok dengan harga sekitar Rp 400.000-Rp 450.000 perkendaraan dengan maksimum tiga penumpang.

BUNTUT OTT PJ BUPATI SORONG

KPK Geledah Ruang Kerja Pius Lustrilanang

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) VI Pius Lustrilanang. Penggeledahan tersebut sebagai pengembangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

"Betul," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri ketika dikonfirmasi tentang informasi penggeledahan tersebut di Jakarta, Rabu (15/11). Namun Ali belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena proses penggeledahan tersebut masih berlangsung.

Sebelumnya, Penyidik KPK pada Selasa (14/11) menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemkab Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Enam tersangka tersebut ialah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya yaitu PLS selaku penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, dan DP selaku ketua tim. Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Provinsi Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS, sebagai representasi dari YPM, dengan AH dan DP yang juga sebagai representasi dari PLS. **(Ant/Has)-d**

USULAN BPIH MASIH BISA DITURUNKAN

Pemberangkatan Haji 2024 Dimulai 12 Mei

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, masa operasional pemberangkatan jemaah calon haji 1445 H/2024 Masehi akan berlangsung selama 30 hari mulai 12 Mei hingga 14 Juni 2024. Pemberangkatan jemaah calon haji ke Tanah Suci dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan mulai 12 sampai 23 Mei 2024. Gelombang pertama ini diberangkatkan dengan tujuan Madinah.

"Sementara untuk pemberangkatan haji gelombang dua dengan tujuan Jeddah berlangsung selama 18 hari mulai 24 Mei hingga 10 Juni 2024," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief dalam rapat kerja (raker) Panja Haji di Jakarta, Rabu (15/11).

Hilman mengatakan, masa operasional kepulangan akan berlangsung selama 30 hari, mulai 22 Juni sampai 21 Juli 2024. Gelombang pertama masa kepulangan dari Jeddah ke Indonesia berlangsung selama 12 hari mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2024. Gelombang kedua dari Madinah selama 18 hari mulai 4 Juli sampai 21 Juli 2024.

"Jadi selesai operasional haji kira-kira minggu ke-4 bulan Juli 2024," ujar Hilman.

Di sisi lain, Kemenag juga telah menyiapkan 14 embarkasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Adapun rinciannya yakni Banda Aceh (BTJ) 13 kelompok terbang atau Kloter, Kualanamu (KNO) 23 Kloter, Padang (PDG) 18 Kloter, Batam (BTH) 33 Kloter, Palembang (PLM) 25 Kloter, Jakarta Pondok Gede (JKG) 68 Kloter, Jakarta Bekasi (JKS) 75 Kloter.

Kemudian, Solo (SOC) 105 Kloter, Surabaya (SUB) 115 Kloter, Banjarmasin (BDJ) 17 Kloter, Balikpapan (BPN) 18 Kloter, Ujungpanjang (UPG) 45 Kloter, Lombok (LOP) 13 Kloter, dan Kertajati (KJT) 30 Kloter. Totalnya ada 598 Kloter. Saat ini jumlah Kloter yang tercantum akan sangat ditentukan dengan jenis pesawat yang tersedia di maskapai. "Rata-rata ada di atas 400 (kursi)," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan optimistis usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang diajukan Kemenag masih bisa diturunkan. "Dengan tetap mengedepankan prinsip *istitha'ah* mudah-mudahan bisa terjangkau oleh masyarakat," ujar Ace.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kemenag mengusulkan biaya haji sebesar Rp105 juta per orang. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan penetapan BPIH 2023 sebesar Rp 90 juta per orang. Ace mengatakan, saat ini Panja BPIH Komisi VIII masih mendalami dan membahas dengan Kemenag. Komponen-komponen yang menjadi acuan pemerintah dalam pengusulan biaya haji ditelisik.

Soal komposisi BPIH yang berasal dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat, hingga saat ini belum ada gambaran. **(Ant/Ati)-f**

ANTISIPASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI

Waspadai Longsor dan Banjir

YOGYA (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY telah melakukan sejumlah persiapan guna mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi. Antisipasi dilakukan untuk meminimalisasi dampak, kerugian atau korban jiwa. Salah satunya dengan meminta masyarakat mewaspadai retakan tanah di lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan longsor saat diguyur hujan deras.

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Lilik Andi Aryanto di Yogyakarta, Rabu (15/11) mengatakan, menghadapi datangnya musim penghujan, BPBD DIY sudah berkoordinasi dengan sukarelawan dan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kewaspadaan. BPBD DIY juga berencana mengadakan apel kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi saat memasuki musim penghujan.

"Pekan ini kami akan memastikan logistik untuk peralatan yang biasanya dibutuhkan saat bencana hidrometeorologi. Bahkan beberapa kalurahan mendapat bantuan peralatan, sehingga jika ada pohon tumbang bisa diatasi secara mandiri," ungkap Lilik.

Lilik menambahkan, masyarakat juga perlu mewaspadai hujan deras disertai angin kencang. Terutama jika di sekitar rumah terdapat pohon atau baliho-baliho besar. **(Ria)-d**

SEPANJANG SEJARAH PENCATATAN IKLIM

Kepala BMKG: 2023 Tahun Terpanas

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, berdasarkan data dari Organisasi Meteorologi Dunia, tahun 2023 dinyatakan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim.

"Dari data Organisasi Meteorologi Dunia, bulan Juli-Agustus 2023 tercatat sebagai tiga bulan terpanas sepanjang sejarah, dengan menyimak evolusi iklim 2023, tahun ini berpeluang besar akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim," kata Dwikorita saat menyampaikan sambutan secara daring di Jakarta, Rabu (15/11).

Dwikorita menyampaikan pernyataan tersebut pada Seminar Nsional 'Perspektif Daerah: Rekomendasi Penanganan Perubahan Iklim untuk Pemerintah Mendatang' di Jakarta, oleh BMKG bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Institut Hijau Indonesia, dan akademisi dari universitas negeri.

"Suhu panas di tahun 2023 mengalahkan saat terjadi El Nino kuat di tahun 2016, bahkan Organisasi Meteorologi Dunia menyimpulkan, ada potensi terjadinya kekeringan yang besar akibat trend kenaikan suhu sebagai dampak perubahan iklim ini," ujarnya.

Dwikorita mengemukakan, bencana iklim di tahun 2023 terjadi di level global, di antaranya Italia, Yunani, Afrika Utara yang pada bulan Juli 2023 suhunya mencapai 47 derajat Celsius, bahkan Amerika di bagian Barat mencapai 53 derajat Celsius, dan selama 31 hari berurutan suhu mencapai lebih dari 43 derajat Celsius. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya, akibat dari gelombang panas yang terjadi di banyak tempat secara bersamaan, dan bulan Juli 2023, tercatat sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah, rata-rata lebih panas dari 30 tahun sebelum ini," ucap Dwikorita.

Ia menyebutkan, untuk sementara Indonesia masih berada di kondisi yang relatif aman, kemungkinan besar disebabkan oleh wilayahnya yang lembab dan dikelilingi samudera yang lebih luas dari daratan. "Namun harus diwaspadai, gaya hidup bisa menyebabkan kekeringan secara lokal, saat El Nino bisa berdampak pada kekeringan selama tiga bulan lebih, dan trennya akan semakin meningkat," tuturnya.

Ia mengemukakan, dampak lanjut dari kenaikan suhu akibat gaya hidup tidak ramah lingkungan yang berakibat pada kekeringan, akan berujung pada terganggunya ketahanan pangan di pertengahan abad 21 atau sekitar tahun 2050.

"Terjadi peningkatan kerentanan pada stok pangan dunia, dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), hampir 500 juta petani skala kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen stok pangan dunia akan sangat terdampak, karena paling rentan terhadap perubahan iklim," paparnya. **(Ant/San)-f**

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA

Panji Gumilang Ajukan Eksepsi

INDRAMAYU (KR) - Pengadilan Negeri (PN) Indramayu Jawa Barat, Rabu (15/11) menggelar sidang kedua terhadap terdakwa Panji Gumilang. Agenda sidang adalah pengajuan eksepsi dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama.

"Jadi, pada agenda sidang kedua hari ini adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari penasIhat hukum terdakwa," kata Juru Bicara (Jubir) PN Indramayu Adrian Anju Purba di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Adrian menjelaskan, sidang dimulai pukul 09.00 WIB dengan dihadiri pihak jaksa penuntut umum (JPU), Majelis Hakim PN Indramayu, serta Panji Gumilang dan tim penasIhat hukumnya. Saat sidang berlangsung, tim penasIhat hukum terdakwa Panji Gumilang diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan yang sudah disampaikan JPU pada sidang sebelumnya di hari Rabu (8/11). "Berikutnya, diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk kemudian diberikan tanggapan bagi JPU atas eksepsi tersebut," jelasnya.

Adrian menegaskan, penyampaian eksepsi itu merupakan hak dari terdakwa. "Pak Panji, sebagai terdakwa, hadir karena ini agendanya nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Sesuai KUHP, itu merupakan hak daripada terdakwa, terhadap setiap dakwaan, dia memiliki hak untuk mengajukan eksepsi," kata Adrian.

Sejumlah petugas keamanan dari pihak kepolisian dan aparat keamanan setempat juga dikerahkan untuk menjamin kelancaran proses persidangan. "Banyaknya aparat untuk memastikan keamanan dan stabilitas sidang," ujarnya.

Pada sidang sebelumnya, JPU mendakwa Panji Gumilang dengan tiga dakwaan yang dikombinasikan dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsider. Dakwaan primer yang disampaikan JPU berkaitan dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1946 mengenai menyiarkan berita bohong hingga sengaja menerbitkan keonaran di tengah masyarakat. JPU juga mendakwa Panji Gumilang dengan UU ITE yakni Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. **(Ant/Has)-f**

JPPR DORONG BAWASLU LEBIH ADIL

Pastikan Netralitas ASN, TNI/Polri

MAGELANG (KR) - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendorong Bawaslu untuk mengawasi dan memastikan netralitas ASN, TNI dan Polri sebagaimana tugas Bawaslu yang diamanatkan Undang-Undang Pemilu.

Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita mendorong agar memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh peserta pemilu dan menjalankan setiap proses pelaksanaan pemilu secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu.

"JPPR mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga konstitusi dan memastikan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara luber jurdil dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraannya," kata Nurlia Dian Paramita kepada *KR*, Rabu (15/11).

Ia mengatakan, JPPR juga mendorong semua pihak melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kepada instansi yang berwenang. Tujuannya agar tidak menjadi bola panas di publik yang dapat menyulut konflik horizontal di tengah masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, termasuk melaporkan adanya dugaan aparat yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu.

JPPR mendorong pihak-pihak yang dilarang untuk tidak melakukan serangkaian aktivitas kampanye sebelum dimulainya masa kampanye serta mendorong Bawaslu untuk aktif mencegahnya.

JPPR katanya, mengutuk semua tindakan yang berorientasi pada lahirnya 'Neo Orde Baru' dengan menggerakan aparat negara berpihak pada calon tertentu. Ia mengemukakan, JPPR menyampaikan pernyataan terkait itu dengan dilatarbelakangi KPU RI yang telah resmi menetapkan capres-cawapres beserta nomor urutnya.

Namun, katanya, penetapan calon tersebut dirasa masih menyisakan residu politik dan hukum terhadap pro kontra putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres. Apalagi setelah MKMK memutus salah satu hakim konstitusi yang dicurigai publik memiliki kepentingan politik dalam penetapan putusan MK tersebut dinyatakan melanggar etik sebagai hakim konstitusi.

Disamping itu, ungkapnya, pada potret lainnya terdapat beberapa hal yang membuat pelaksanaan pemilu ini akan mengganjal, yakni munculnya isu dugaan kecurangan pemilu yang dinarasikan sebagian elit politik akan semakin mempersuram situasi pemilu yang sebentar lagi hendak memasuki tahapan kampanye. "Pasalnya, isu kecurangan pemilu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum yang tersedia," ujarnya. **(Osy)-f**

KR-Antara/Anis Efizudin

***PEMUSNAHAN BARANG BUKTI:** Kepala Kejaksaan Negeri Magelang Yuniken Pujiastuti (kiri) bersama Kapolres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalyn Sebayang (kanan) memusnahkan barang bukti kejahatan saat pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum di Kantor Kejaksaan Negeri Magelang, Jateng, Rabu (15/11/2023). Kejari Magelang memusnahkan berbagai barang bukti perkara tindak pidana umum seperti narkotika, obat terlarang, senjata tajam, dan telepon seluler yang telah berkekuatan hukum tetap guna menghindari penyalahgunaan.*